

PROSES HUKUM BANSOS KONI MENGGANTUNG

PONTIANAK. Penanganan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial Komite Olahraga Nasional Indonesia (Bansos KONI) Kalbar senilai Rp22,14 miliar hingga kini belum tuntas.

Padahal pengusutan kasus tersebut sudah berlangsung sejak 2009 silam. Bahkan pernah ditangani KPK-RI, sebelum kembali diambil alih Polda Kalbar. Kepolisian menyatakan masih menunggu hasil audit BPK untuk menuntaskan proses hukumnya. "Kita masih menunggu hasil audit BPK," kata Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar, Selasa (15/5).

Menurut Mukson, persyaratan yang diminta BPK sudah dilengkapi dan diserahkan untuk mendapatkan hasil audit. Salah satunya dengan melengkapi keterangan saksi. Setelah itu memeriksa ketua umum Pengda PSSI Ir H Zulfadhli dan mantan ketua

umum KONI Kalbar H Usman Ja'far. Kini keduanya menjabat anggota DPR-RI pemilihan Kalbar.

Sementara dalam kasus Bansos KONI, Polda telah menetapkan seorang tersangka, Iswanto, mantan wakil bendahara KONI.

Mencuatnya kasus Bansos ini bermula dari hasil audit regular yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008. Termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008. Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO). Penyebab DO, BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya. Untuk meneliti penggunaan dana tersebut,

BPK Perwakilan Kalbar membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Dari hasil penelitian PDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat. Hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah. Empat item itu, temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp10,07 miliar. Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Prapon sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil

■ Halaman 15



Proses Hukum.....dari halaman 9

Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp8,59 miliar. Yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp2,114 miliar. (sul)